



Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Keuangan Inklusif pada Pelaku UMKM Perempuan

Jihan Anggraeni Ramdani Arisa*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 6/6/2022

Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 15 - 22

Terbitan : **Juli 2022**

ABSTRAK

Pelaku UMKM perempuan memiliki kesulitan tersendiri dalam mengakses kredit usaha dan cara mengelola keuangan usahanya. Guna membantu masyarakat terutama pelaku UMKM perempuan dalam pengetahuan dan akses, pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Jenis analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan instrumen kuesioner. Metode analisis deskriptif menunjukkan, implementasi SNLK terhadap pelaku UMKM perempuan binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sudah cukup baik. Kategori tingkat literasi pada indikator pengetahuan, keterampilan, keyakinan dan sikap termasuk sufficient literate. Namun, perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut mengenai fungsi lembaga penjamin kredit, fungsi dan jenis rasio keuangan yang berguna untuk pengembangan usaha dan implementasi SNKI terhadap pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM sudah baik, pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM merasa program kredit usaha akan memberikan efek positif terhadap perkembangan usaha mereka tetapi mereka kesulitan mengakses program tersebut karena salah satu syarat pengajuan kredit usaha adalah agunan.

Kata Kunci : Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Pelaku UMKM Perempuan.

ABSTRACT

Especially women MSMEs in knowledge and access, the government issued the National Financial Literacy Strategy (SNLK) and the National Inclusive Finance Strategy (SNKI). The type of analysis is quantitative descriptive using primary and secondary data. Collected through surveys using questionnaire instruments. Descriptive analysis methods show that the implementation of SNLK against female MSMEs built by the Small and Medium Micro Enterprise Cooperative Service is good enough. The literacy level category on indicators of knowledge, skills, beliefs and attitudes including sufficient literate but further socialization needs to be held regarding the function of credit guarantor institutions, functions and types of financial ratios that are useful for business development and the implementation of SNKI to MSMEs female are good, they feel the business credit program will have a positive effect on their business development but they have difficulty accessing the program because one of the terms of business credit application is collateral.

Keywords : National Strategy Financial Inclusion; female MSME actors.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Kota Bandung merupakan penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu tahun 2018-2019. Tahun 2020 semenjak pandemi, PDRB Kota Bandung mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada tingkat minat daya beli masyarakat dan berpengaruh pada faktor pembentuk PDRB antara lain produksi, konsumsi, investasi dan distribusi ekspor dan impor (Permana, 2020). Dibalik kontribusinya yang sangat besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami masalah yaitu permodalan dengan persentase 51.09% (Pusat Pengelolaan Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2012). Masalah yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya menarik perhatian pemerintah, sehingga pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu masalah akses permodalan UMKM di Indonesia, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya KUR belum banyak digandrungi oleh para pelaku UMKM dengan alasan program tersebut disalurkan melalui perbankan dan banyak syarat yang menyulitkan pelaku UMKM. Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah pendampingan pelaku UMKM yang menerima KUR (Triyono, 2019). Masyarakat, terutama pelaku UMKM, baiknya memiliki tingkat pemahaman mengenai pengetahuan dasar keuangan karena akan mempermudah pelaku UMKM untuk mengambil keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan sehingga mempermudah UMKM dalam membuat laporan keuangan untuk pengajuan kredit pada lembaga keuangan formal maka pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah pedoman langkah- langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 2020). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) adalah life skill bagi masyarakat agar mereka dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang baik perihal menggunakan uang untuk sesuatu yang tidak konsumtif dan masih minim pengetahuan mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan formal. Tujuan dari literasi keuangan adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat menjadi well literate dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya juga mengetahui dengan pasti manfaat dan risiko, hak dan kewajiban disertai dengan yakin akan produk jasa keuangannya dapat meningkatkan kesejahteraan (OJK, 2017).

Tahun 2019, tingkat Inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia masing-masing mencapai 38.08% dan 76.19% (Sikapuangmu Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pencapaian angka tersebut berhasil mencapai target pemerintah pada Perpres No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) namun masih berada dibawah rata-rata survei dari internasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (OECD, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperhatikan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan berdasarkan *gender* guna mengetahui gap literasi keuangan dan inklusi keuangan antara perempuan dan laki-laki. Didapatkan hasil tingkat literasi laki-laki adalah 39.94% dan inklusinya 77.24% sementara tingkat literasi perempuan 36.13% dan inklusinya 75.15%. Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan laki-laki ternyata lebih tinggi daripada perempuan, diartikan bahwa pengetahuan dan penggunaan lembaga keuangan formal oleh perempuan masih perlu ditingkatkan lagi. Bappenas (2017), perempuan lebih condong menggunakan akses keuangan non-formal dalam masalah keuangannya padahal 50% UMKM di Indonesia pelakunya adalah seorang perempuan dan bermasalah dalam modal usaha (Mashabi, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dikeluarkan pemerintah terhadap tingkat inklusi keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan; (2) Bagaimana implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang dikeluarkan pemerintah terhadap tingkat literasi keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi implementasi SNKI terhadap tingkat inklusi keuangan pelaku UMKM perempuan di Kota

Bandung; (2) Mengidentifikasi implementasi SNLK terhadap tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di Kota Bandung.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 6.407 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan dilakukan dengan cara pembobotan nilai per butir pertanyaan yang akan disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Jawaban Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Interval	Kategori
352-432	<i>Well Literate/ Sangat Setuju</i>
271-351	<i>Sufficient Literate/ Setuju</i>
190-270	<i>Less Literate/ Tidak Setuju</i>
108-189	<i>Not Literate/ Sangat Tidak Setuju</i>

Kategori jawaban untuk literasi keuangan disesuaikan dengan kategori dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu well literate, sufficient literate, less literate dan not literate juga kategori sangat setuju, setuju, tidak setuju dan tidak setuju untuk beberapa pertanyaan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Analisis Tingkat Literasi Keuangan

Literasi keuangan dalam penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan dan sikap. Pertama yaitu indikator pengetahuan

Tabel 2. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Indikator Pengetahuan.

INDIKATOR PENGETAHUAN	KATEGORI								Total Skor Keseluruhan	Keterangan
	1		2		3		4			
	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>		
Persyaratan pengajuan kredit	9	9	7	14	63	189	29	116	328	Sufficient Literate
Persyaratan pengajuan kredit	2	2	8	16	46	138	52	208	364	Well Literate
Persyaratan pengajuan kredit	15	15	10	20	51	153	32	128	316	Sufficient Literate
Persyaratan pengajuan kredit	18	18	15	30	50	150	25	100	298	Sufficient Literate
Persyaratan pengajuan kredit	2	2	13	26	51	153	42	168	349	Sufficient Literate
Konsep 5C	11	11	14	28	62	186	21	84	309	Sufficient Literate
Konsep 5C	9	9	13	26	60	180	26	104	319	Sufficient Literate

Lanjutan Tabel 2. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Indikator Pengetahuan.

INDIKATOR PENGETAHUAN	KATEGORI								Total Skor Keseluruhan	Keterangan
	1		2		3		4			
	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>		
Konsep 5C	2	2	15	30	55	165	36	144	341	Sufficient Literate
Konsep 5C	5	5	15	30	61	183	27	108	326	Sufficient Literate
Konsep 5C	5	5	19	38	54	162	30	120	325	Sufficient Literate
fungsi Lembaga Penjamin Kredit	9	9	29	58	51	153	19	76	296	Sufficient Literate
TOTAL									325	Sufficient Literate

Rata-rata para pelaku usaha perempuan binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah sufficient literate atau yang dapat diartikan sudah cukup baik dalam indikator pengetahuan. Mereka mengetahui persyaratan untuk mengajukan kredit usaha di lembaga keuangan formal, mengetahui konsep 5C yang digunakan oleh lembaga keuangan formal untuk menyeleksi pengusaha dalam menggunakan kredit usaha dan mengetahui fungsi lembaga penjamin kredit usaha. Namun, kredit usaha yang disediakan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan formal sulit diakses maka para pelaku usaha perempuan akan tetap sulit mengembangkan usahanya karena kesulitan mengakses modal. Indikator selanjutnya yaitu indikator keterampilan, berikut adalah tabel hasil olah data kuesioner dan analisis dari indikator keterampilan.

Tabel 3. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Indikator Keterampilan.

INDIKATOR KETERAMPILAN	KATEGORI								Total Skor Keseluruhan	Keterangan
	1		2		3		4			
	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>		
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan UMKM	13	13	18	36	64	192	13	52	293	Sufficient Literate
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan UMKM	6	6	18	36	60	180	24	96	318	Sufficient Literate
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan UMKM	11	11	21	42	59	177	17	68	298	Sufficient Literate
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan UMKM	12	12	14	28	63	189	19	76	305	Sufficient Literate
Penyusunan Laporan Keuangan BerdasarkanStandar Akuntansi Keuangan UMKM	14	14	21	42	58	174	15	60	290	Sufficient Literate

Lanjutan Tabel 3. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Indikator Keterampilan.

INDIKATOR KETERAMPILAN	KATEGORI								Total Skor Keseluruhan	Keterangan
	1		2		3		4			
	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>		
Fungsi analisis rasio keuangan usaha	10	10	17	34	66	198	15	60	302	SufficientLiterate
Fungsi analisis rasio keuangan usaha	9	9	20	40	62	186	17	68	303	SufficientLiterate
Fungsi analisis rasio keuangan usaha	8	8	22	44	62	186	16	64	302	SufficientLiterate
Jenis Rasio KeuanganUsaha	19	19	18	36	59	177	12	48	280	SufficientLiterate
Jenis Rasio KeuanganUsaha	20	20	17	34	59	177	12	48	279	SufficientLiterate
Jenis Rasio KeuanganUsaha	17	17	19	38	60	180	12	48	283	SufficientLiterate
Jenis Rasio KeuanganUsaha	18	18	20	40	56	168	14	56	282	SufficientLiterate
TOTAL									295	SufficientLiterate

Indikator keterampilan menunjukkan rata-rata yang cukup bagus karena skor yang diperoleh yaitu 295 termasuk kategori sufficient literate, artinya pelaku usaha perempuan binaan Dinas KUMKM sudah cukup paham mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, fungsi analisis rasio keuangan usaha dan jenis rasio keuangan usaha yang berguna bagi pelaku usaha perempuan. Rata-rata yang cukup bagus tersebut tidak luput dari program yang diadakan oleh Dinas KUMKM seperti melakukan edukasi/pengelolaan bisnis juga pembinaan mengenai cara membuat laporan keuangan dan bekerja sama dengan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (BALATKOP) untuk mengasah kemampuan para pelaku usaha perempuan. Indikator selanjutnya yaitu indikator keyakinan dan sikap, berikut adalah tabel hasil olah data kuesioner dan analisis dari indikator keyakinan dan sikap.

Tabel 4. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Indikator Keyakinan dan Sikap.

INDIKATOR KEYAKINAN DAN SIKAP	KATEGORI								Total Skor Keseluruhan	Keterangan
	1		2		3		4			
	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>		
Saya lebih mempercayakan meminjam dana usaha pada kerabat daripada Bank	21	21	33	66	30	90	24	96	273	Setuju
Saya lebih meyakini LJK Konvensional daripada LJK Syariah dalam pembiayaan modal kerja	8	8	57	114	26	78	17	68	268	TidakSetuju
Saya meminjam pada LJK yang memiliki kredibilitas baik	4	4	5	10	42	126	57	228	368	Sangat Setuju
TOTAL									308	Setuju

Indikator keyakinan dan sikap, mayoritas jawaban dari para pelaku usaha perempuan termasuk pada kategori setuju atau sufficient literate dapat disimpulkan bahwa responden telah meyakini lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan/kredit usaha. Pada pernyataan pertama mengenai keyakinan meminjam dana usaha pada kerabat daripada bank menunjukkan hasil setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku usaha perempuan masih sukar untuk meminjam dana usaha pada bank makadari itu Dinas KUMKM dan pemerintah Kota Bandung. Kemudian pada pernyataan mengenai keyakinan para pelaku usaha terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) konvensional atau syariah, jawaban para pelaku usaha perempuan tersebut adalah mereka lebih meyakini LJK syariah karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam maka diharapkan pemerintah lebih mengembangkan LJK berbasis syariah dan para pelaku LJK lebih mengenalkan

kembali LJK syariah pada masyarakat. Terakhir yaitu mengenai sikap para pelaku usaha perempuan binaan Dinas KUMKM dalam meminjam dana usaha, dimana mereka sangat menyetujui bahwa mereka lebih memilih meminjam pada LJK yang mempunyai kredibilitas baik sehingga akan terhindar dari peminjaman ilegal atau pinjol yang tidak terpantau OJK.

Analisis Tingkat Inklusi Keuangan

Analisis tingkat inklusi keuangan pada penelitian ini hanya menggunakan indikator penggunaan. Berikut adalah hasil dari olah jawaban kuesioner dan analisis indikator penggunaan pada inklusi keuangan.

Tabel 5. Analisis Tingkat Inklusi Keuangan Indikator Penggunaan

INDIKATOR PENGGUNAAN	KATEGORI								Total Skor Keseluruhan	Keterangan
	1		2		3		4			
	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>	<i>f</i>	<i>x</i>		
Saya menggunakan Kredit UMKM di lembaga keuangan formal	11	11	17	34	60	180	20	80	305	Setuju
Saya merasa Kredit UMKM yang diberikan lembaga keuangan formal memberikan dampak positif pada perkembangan UMKM saya.	5	5	16	32	62	186	25	100	323	Setuju
Saya merasa keberatan dengan syarat agunan untuk pengajuan kredit UMKM	9	9	32	64	49	147	18	72	292	Setuju
Saya tidak merasa keberatan dengan syarat NPWP untuk pengajuan kredit UMKM	5	5	25	50	61	183	17	68	306	Setuju
Saya tidak merasakeberatan usaha saya tidak bisa mendapatkan dua sekaligus pembiayaan dari LJK	8	8	32	64	58	174	10	40	286	Setuju
TOTAL									290	Setuju

Pernyataan pertama dari indikator penggunaan ini adalah mengenai penggunaan kredit usaha oleh para pelaku usaha perempuan dan mayoritas menjawab setuju dengan skor 305. Pernyataan kedua yaitu mengenai dampak positif dari kredit usaha terhadap pelaku usaha perempuan, mereka menyetujui bahwa benar kredit usaha memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan usahanya, pada pernyataan kedua skor yang diperoleh yaitu 323. Lalu pernyataan ketiga adalah pernyataan mengenai syarat agunan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kredit usaha. Pelaku usaha perempuan binaan Dinas KUMKM merasa keberatan mengenai syarat agunan. Hal tersebut memberatkan para pelaku perempuan dalam meminjam kredit usaha di perbankan. Pernyataan kelima mengenai syarat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk

mengajukan kredit usaha, pelaku usaha perempuan binaan Dinas KUMKM tidak merasa keberatan dengan syarat tersebut karena salah satu syarat untuk menjadi anggota binaan Dinas KUMKM pun membutuhkan NPWP. Terakhir, pernyataan ketujuh mengenai penggunaan dua sekaligus kredit usaha oleh pelaku usaha. Mereka tidak merasa keberatan tidak menggunakan dua sekaligus kredit usaha dari LJK yang berbeda dengan skor sebesar 286 yang termasuk kedalam kategori setuju.

Analisis Ekonomi

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, penanggulangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat. SNLK merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada penggunaan produk keuangan di lembaga keuangan formal (Grohmann et al., 2018), jika literasi keuangan masyarakat baik maka akan timbul keputusan dalam membeli produk keuangan yang berkualitas dan meminimalisir kegagalan dalam menentukan keputusan manakala menghadapi isu ekonomi atau keuangan. Maka dari itu akses keuangan tidak akan digunakan secara maksimal jika literasi keuangan masyarakat tidak cukup baik, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Firdaus et al., 2020) literasi keuangan dapat membantu pelaku usaha perempuan menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan keuangan.

Tingkat literasi keuangan yang baik juga berpengaruh pada kesejahteraan individu. Para pelaku UMKM perempuan binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah memiliki kemampuan literasi keuangan yang cukup baik sehingga dapat diartikan bahwa mereka mampu mengelola keuangan usahanya agar terus berkembang (Baporikar & Akino, 2020) dan pelaku usaha perempuan dapat memaksimalkan ketersediaan akses di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat inklusi keuangan di Jawa Barat saat ini mencapai 88.48% sehingga ketersediaan akses keuangan di Jawa Barat sudah cukup tinggi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk para pelaku usaha perempuan.

Inklusi keuangan merupakan salah satu program pemerintah dan sektor keuangan yang berguna untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukannya akses yang mudah bagi masyarakat terutama pelaku usaha perempuan untuk menggunakan produk dan jasa perbankan guna mendukung keberlangsungan usahanya, seperti peminjaman kredit usaha. Dengan harapan mampu membantu para pelaku usaha perempuan mengembangkan usahanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan usahanya sekaligus taraf hidup para pelaku usaha perempuan (Kusnandar, 2018). Adapun terciptanya pertumbuhan ekonomi yang juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan pelaku usaha (Andriani & Wiksuana, 2018) tetapi kredit usaha yang disediakan oleh pemerintah melalui perbankan sampai saat ini masih sulit untuk diakses oleh para pelaku usaha perempuan. Dimana adanya rasa terbebani oleh syarat agunan padahal jika program inklusi keuangan dijalankan secara adil terhadap para pelaku usaha perempuan akan menghasilkan dampak yang baik bagi pelaku usaha dan pemerintah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, indikator pengetahuan dalam literasi keuangan pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM termasuk kategori sufficient literate dapat diartikan bahwa sudah cukup baik dalam memahami persyaratan-persyaratan dasar mengenai peminjaman kredit usaha tetapi masih perlu pengenalan lebih jauh mengenai fungsi dari lembaga penjamin kredit Indikator keterampilan dalam literasi keuangan pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM termasuk kategori sufficient literate dapat diartikan bahwa sudah cukup baik dalam keterampilan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi namun meskipun termasuk kategori yang sudah cukup baik. Pelaku usaha perempuan binaan Dinas KUMKM perlu diberi penjelasan lebih jauh lagi mengenai fungsi dan jenis rasio keuangan usaha. Indikator keyakinan dan sikap dalam literasi keuangan pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM termasuk kategori sufficient literate dapat diartikan bahwa pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM sudah mempercayakan dan mengetahui bank yang berkredibilitas baik sebagai tempat untuk meminjam modal usaha dan berbasis syariah. Indikator penggunaan kredit/pembiayaan usaha dalam inklusi keuangan pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM merasa kredit usaha akan memberikan efek yang positif terhadap perkembangan usaha mereka tetapi mereka kesulitan mengakses program tersebut karena salah satu syarat pengajuan kredit usaha adalah

agunan. Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Strategi Nasional Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM perempuan binaan Dinas KUMKM dapat disimpulkan sudah diterapkan dengan baik oleh Dinas KUMKM yang menaungi pelaku UMKM perempuan tersebut namun belum mencapai kondisi *financial wellbeing*.

Daftar Pustaka

- Andriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Fakultas, MASYARAKAT DI PROVINSI BALI Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Percepatan pertumbuhan ekonomi memang berperan sebagai syarat yang strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat, namun pertumbuhan ekonomi tida. *Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 6420–6444.
- Baporikar, N., & Akino, S. (2020). Financial Literacy Imperative for Success of Women Entrepreneurship. *International Journal of Innovation in the Digital Economy*, 11(3), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.4018/ijide.2020070101>
- Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif* (Issue 051209, pp. 1–23). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik.
- Firdaus, R., Yasin, F., Mahmud, M. W., & Diniyya, A. A. (2020). Journal of Halal Industry and Services Significance of Financial Literacy among Women Entrepreneurs on Halal Business. *Journal of Halal Industry and Services*, 1–9.
- Grohmann, A., Klühs, T., & Menkhoff, L. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*, 111, 84–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020>
- Kusnandar, L. D. (2018). Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia. *Monex*, 7(2), 355. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/tw.v14i2.649>
- Mashabi, S. (2020). Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan. *Nasional Kompas*, 1. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/19472111/menteri-pppa-50-persen-pengusaha-umkm-adalah-perempuan?page=all>
- OECD. (2020). *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy*. www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport%0A.htm%0A
- OJK. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Permana, C. (2020). Tingkatkan Laju Ekonomi di Kota Bandung, Pemkot Bandung Siapkan Sejumlah Bantuan Bagi Pelaku UMKM. *Jabar.Tribun News*, 1. <https://jabar.tribunnews.com/2020/08/31/tingkatkan-laju-ekonomi-di-kota-bandung- pemkot-bandung-siapkan-sejumlah-bantuan-bagi-pelaku-umkm>
- Pusat Pengelolaan Risiko Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2012). Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Badan Kebijakan Fiskal*, 47.
- Sikapuangmu Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019*.
- Triyono, A. (2019). Percuma Bunga Turun Kalau KUR Sulit Ditembus Pelaku UMKM. *CNN INDONESIA*, 1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191113095915-78-447891/percuma-bunga-turun-kalau-kur-sulit- ditembus-pelaku-umkm>